

Sistem Ekonomi Pancasila Di Negara Hukum Indonesia Dalam Menjamin Hak Warganegara Atas Pembaharuan Melalui Affiliate Tiktok Shop

¹ Niken Aulia Kusumawati, ² Yukova Miska Athira, ³ Windi Edriani Ningsih, ⁴ Mustaqim

¹⁻⁴ Universitas Pakuan

Korespondensi : nikenauliak@gmail.com

Abstract . Indonesia, as a country with the philosophical foundation of Pancasila, embraces the Pancasila Economic System that prioritizes social values, justice, and people's welfare. In its development, the Indonesian economy has undergone significant transformation, especially with the adoption of digital technology. One of the recent phenomena that characterizes this change is the emergence of online business models, including Affiliate TikTok Shop. As the foundation of the state, Pancasila affirms the human rights of citizens, especially the freedom to pursue economic prosperity and progress. It is hoped that in this situation, the Pancasila Economic System will serve as the foundation for implementing economic changes that advance the welfare of all citizens. Therefore, a thorough examination of the implementation of the Pancasila Economic System is needed to protect the rights of citizens through Affiliate TikTok Shop. The TikTok Shop Affiliate business model, which combines a digital business component with affiliate network marketing, has developed into an important component in the ecosystem that supports the digital economy. An important topic is how the Pancasila Economic System responds and adapts to these processes. Measuring how well the ideals of Pancasila and the rights of the people are upheld in the era of digital economic change will become easier with an understanding of the functioning of the Pancasila Economic System in TikTok Shop Affiliation. In an effort to explore the possibility of economic rejuvenation, this research becomes relevant when analyzing the interactions between the Pancasila Economic System, the Indonesian Rule of Law, and the TikTok Shop Affiliation. By gaining a deeper understanding of these interactions, strategies that facilitate the establishment of a just and inclusive digital economy in Indonesia can be developed.

Keywords: Pancasila Economy, TikTok Shop

Abstrak . Indonesia, sebagai negara dengan fondasi filosofis Pancasila, menganut Sistem Ekonomi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai sosial, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangannya, ekonomi Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan adopsi teknologi digital. Salah satu fenomena terkini yang mencirikan perubahan tersebut adalah munculnya model bisnis online, termasuk Affiliate TikTok Shop. Sebagai dasar negara, Pancasila menegaskan hak asasi manusia warga negara, terutama kebebasan untuk mengejar kemakmuran dan kemajuan ekonomi. Diharapkan bahwa dalam situasi ini, Sistem Ekonomi Pancasila akan berfungsi sebagai landasan untuk menerapkan perubahan ekonomi yang memajukan kesejahteraan seluruh warga negara. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap implementasi Sistem Ekonomi Pancasila untuk melindungi hak-hak warga negara melalui Afiliasi TikTok Shop. Model bisnis Afiliasi TikTok Shop, yang memadukan komponen bisnis digital dengan pemasaran jaringan afiliasi, telah berkembang menjadi komponen penting dalam ekosistem yang mendukung ekonomi digital. Topik yang penting adalah bagaimana Sistem Ekonomi Pancasila merespons dan menyesuaikan diri dengan proses-proses ini. Mengukur seberapa baik cita-cita Pancasila dan hak-hak rakyat ditegakkan di era perubahan ekonomi digital akan menjadi lebih mudah dengan pemahaman tentang fungsi Sistem Ekonomi Pancasila dalam Afiliasi TikTok Shop. Dalam upaya untuk mengeksplorasi kemungkinan peremajaan ekonomi, penelitian ini menjadi relevan ketika menganalisis interaksi antara Sistem Ekonomi Pancasila, Negara Hukum Indonesia, dan Afiliasi TikTok Shop. Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi ini, strategi yang memfasilitasi pembentukan ekonomi digital yang adil dan inklusif di Indonesia dapat dikembangkan.

Kata Kunci : Ekonomi Pancasila, TikTok Shop

LATAR BELAKANG

Pengertian hukum ekonomi sendiri mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa, serta terdiri dari seperangkat lembaga swasta dan pemerintah yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatur kegiatan perekonomian nasional dan kehidupan perekonomian nasional. Karena pesatnya

Received: Desember 29, 2023; Accepted: Januari 16, 2023; Published: Januari 31, 2024

* Niken Aulia Kusumawati , nikenauliak@gmail.com

kemajuan perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia, lahirlah hukum ekonomi. Tujuan hukum ekonomi sendiri adalah untuk membatasi, mengatur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar perekonomian Indonesia dapat berkembang tanpa membatasi hak-hak masyarakat.

Indonesia mempunyai dua kategori undang-undang perekonomian: undang-undang pembangunan ekonomi dan undang-undang sosial ekonomi. UU Pembangunan Ekonomi adalah undang-undang yang bertujuan untuk mengembangkan kehidupan perekonomian Indonesia, sedangkan UU Sosial Ekonomi juga mengacu pada undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Dari uraian di atas jelaslah bahwa hukum ekonomi di Indonesia berarti segala peraturan dan keputusan hukum khusus yang mengatur kegiatan perekonomian dan kehidupan perekonomian di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sistem Ekonomi Pancasila di Negara Hukum Indonesia dapat menjamin hak warga negara atas pembaruan melalui affiliate TikTok Shop ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah dalam menjamin hak warga negara atas pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop ?

Tujuan Penulisan

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat luas tentang perbedaan sistem ekonomi pancasila dan sistem ekonomi modern dalam menjamin hak warga negara Indonesia
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang hukum ekonomi yang berlaku di negara hukum Indonesia

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan berdasarkan produk hukum seperti undang-undang. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*Library Research*), dan sumber hukum yang digunakan, yaitu undang-undang, jurnal, buku, dan artikel.

PEMBAHASAN

Teori Sistem Ekonomi Klasik dan Sistem Ekonomi Modern

Dalam teori ekonomi klasik dan modern banyak pendapat dan sudut pandang yang dikemukakan dari beberapa ahli terutama ahli ekonomi yaitu Robert M. Solow, yang mana ia mengemukakan terkait faktor utama dalam ekonomi antara lain yaitu masyarakat/individu, adanya perkembangan dari teknologi yang menuju ke modernitas, terdapatnya akumulasi

modal yang dilaksanakan oleh individu atau kelompok serta adanya hasil yang didapati dari hal tersebut. selain itu ahli lain mengemukakan pendapatnya yaitu Solow yang mana ia memaparkan terkait pertumbuhan penduduk yang mana ia mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk memberikan ragam efek tergantung sudut mata yang memandang karena di dalam pertumbuhan penduduk terdapat positif dan negatif efek yang dihasilkan di dalamnya. Sehingga di tambahkan oleh Solow bahwa pertumbuhan penduduk haruslah di seimbangkan dengan sumber daya produkti dengan memanfaatkan sumber daya produktif tersebut.

Ditambahkan oleh Solow ia mengemukakan pendapatnya terkait adanya tingkat tabungan yang ada di dalam masyarakat memberikan efektivitas pada hasil serta modal yang ditanamkan. Jika tabungan yang di tanamkan itu tinggi maka modal serta hasil yang akan di dapati oleh seseorang yang memberikan enabungan tersebut akan meningkat juga sesuai dengan tabungan yang ia tabungkan.

Jikamembahas dalam ekonomi modern yang terjadi saat ini, seorang ahli ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat (USA) yaitu Paul A. Samuelson ia memberikan pendapat terkait hal yang menyerang ekonomi modern yaitu permasalahan yang sering terjadi wehingga menjadi permasalahan pokok di era modernitas saat ini. dalam hal ini akan di kemukakan dengan menggunakan pertanyaan yaitu seperti Apa (What), Bagaimana (How), serta Untuk siapa barang diproduksi (for Whom). Sehingga hal ini akan di paparkan secara lebih luas antara lain yaitu :

1. pada pertanyaan yang melibatkan What atau yang sering diketahui dengan Apa serta Berapa, dalam ekonomi modern terkait apa dan berapa di kaitkan dalam perihal aspek yang meliputi adanya perihal pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan yang dimaksud ini berkaitan dengan produksi yang ada di dalam masyarakat. Adapun produksi yang dimaksud yaitu terkait seberapa banyak barang yang akan di produksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat? Dalam hal ini terdapat permasalahan yang menjadi perihal utama yang mana permasalahannya berada dalam jenis serta jumlah produk yang dilaksanakan produksi. Contohnya seperti barang apa yang harus dilaksanakan produksi entah itu obat, makanan pokok masyarakat, pakaian dan lain-lain. sebenarnya tidaklah dapat memungkinkan terkait memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dengan cara memproduksi seluruh kebutuha yang di inginkan masyarakat. Dalam memenuhikebutuhan yang ada di dalam masyarakat di perlukan yang namanya alokasi sumber daya agar dapat menciptakan barang yang di inginkan oleh masyarakat. Sistemnya seperti ketika kita melaksanakan pemroduksian pangan yang lebih banyak, maka akan menyebabkan sedikitnya produksi untuk memenuhi sumber daya obat-obatan

dan seterusnya. Lain halnya kita juga haruslah membayangkan perihal pentingnya pemokusn terkait pembangunan yang ada dalam sektor tertentu contohnya seperti kenapa tidak memprioritaskan terkait sektor dalam pertanian dan industri yang mana mereka saling berhubungan. Ketika telah diputuskan apa yang akan diproduksi maka yang akan dilaksnaakan berikutnya adalah terkait pelaksanaan pemutusan yang akan dilaksanakn produksi seperti memutuskan terkait jumlah yang akan dilaksanakn produksi sektor tersebut dan apa serta berapakah yang harus dilaksanakannya proses produksi yang disesuaikan dengan keterkuatan ekonomi dan sistem perekonomian bagi negara yang melaksanakan penerapan di dalamnya.

2. pada pertanyaan yang melaksanakan keterlibatan How atau Bagaimana? Ini merupakan hal yang mana digantungkan pada letak seperti apa dan bagaimana produk tersebut agar dapat di laksanakan produksi di dalamnya, produksi yang dimaksud di libatkan di dalamnya adalah pelaku pelaksanaan produksi, unsur yang akan dilaksnaakannya produksi di dalamnya, serta teknologi yang mencukupi untuk melaksanakan proses produksi tersebut. sebagai contoh ketika kita akan melaksanakan produksi di dalamnya sebelum pelaksanaannya kita akan mempertimbangkan yangterbaik untuk produksi seperti metode yang akan dijadikan pelaksana, serta teknologi yang akan dijadikan sebuah alat untuk melaksnaakan porduksi.
3. setelah itu ada pertanyaan yan melaksanakan keterlibatan For whom atau yang dimaksud dengan Untuk siapa? Dalam hal ini diadakannya untuk siapa karena kita akan melihat produksitersebut untuk siapa kita tujuan hasil dari produksi tersebut sehingga dibuat sesuai kebutuhan orang yang memerlukannya. Ketika membahas perihal untuk siapa maka yang akan menjadi permasalahan utama adalah perihal pendistribustrian terkait produk, yang mana distribusi ini adalah hal yang sangat penting yang harus dilaksakan perancangan yang baik agar produksi produk yang akan dilaksanakan akan terwujud dengan baik dan sesuai dengan ebutuhan orang yang membutuhkan tersebut atau objek sasaran yang dijadikan tujuan. Siapa yang dimaksud di dalam perihal produksi ini bukan yang menggunakan hasil dari produksi tersebut tetapi orang yang mendapatkan manfaat dari produk yang telah memakai hasilproduksi tersbeut termasuk di dalamnya pelaku dalam produksi.

Sistem Ekonomi Pancasila di Negara Hukum Indonesia yang dapat menjamin hak warga negara atas pembaruan melalui affiliate TikTok Shop

Kehadiran TikTok Shop yang membuat masyarakat lebih senang berbelanja online menimbulkan protes para retailer offline karena produk dan lapaknya dikosongkan akibat kehadiran Tiktokshop mengapa demikian? Masyarakat Indonesia lebih memilih “toko online”

dibandingkan langsung ke toko offline, sehingga harganya tidak hanya lebih nyaman tetapi juga jauh lebih murah. Penjual TikTokshop berhak bertransaksi di platform apapun. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa di era teknologi yang semakin maju, masyarakat bisa lepas dari toko online. Pengecer offline kini mempunyai hak yang sama untuk bertransaksi di toko offline dan online miliknya. jikalau soal hak, kita sebagai manusia tentunya mempunyai hak yang sama untuk bertindak dimanapun kita berada.

Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang termaktup di dalam Pasal 28 J yang mana tercantum pada ayat 1 yang menjelaskan terkait perihal mengenai semua orang memiliki kewajiban untuk menghormati terkait hak yang ada di dalam diri manusia (HAM) atau yang ada di dalam diri masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang tertib di dalam masyarakat, serta bberbangsa dan bernegara. Lalu di dapati pula di dalam UUD 1945 pasal 28 J yang dicantumkan dalam ayat 2 yang mana ini membahas terkait setiap orang berhak dalam melaksanakan hak serta kebebasan yang ia miliki, seluruh orang haruslah patuh kepada halyang telah di tetapkan di dalam UU yang mana ini dibuat untuk mendapatkan hak yang di miliki orang lain sehingga ia bebas dalam memenuhi haknya serta dapatmemenuhi tuntutan yang adil dan setara yang mana telah dilaksanakannya pertimbangan matang terkait moral, nilai agama di dalam masyarakat, keamanan masyarakat serta ketertiban umum yang ada di dalam mayarakat yang bersifat demokratis. Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sistem Ekonomi Pancasila bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial adalah dengan menjamin hak warga negara atas pembaruan. Affiliate TikTok Shop adalah salah satu cara untuk mendorong pembaruan di Indonesia. Affiliate TikTok Shop adalah program pemasaran afiliasi yang memungkinkan pengguna TikTok Shop untuk mempromosikan produk atau jasa dari toko lain dan mendapatkan komisi dari penjualan yang mereka hasilkan. Affiliate TikTok Shop dapat menjadi sarana untuk menjamin hak warga negara atas pembaruan karena dapat memberikan kesempatan bagi warga negara untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka. Dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi, warga negara dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Namun, ada beberapa tantangan dalam menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila di Negara Hukum Indonesia dalam menjamin hak warga negara atas pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop. Tantangan tersebut antara lain:

1. Kurang meratanya akses terhadap teknologi dan informasi. Hal ini dapat menghambat warga negara untuk memanfaatkan Affiliate TikTok Shop sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak menyadari pentingnya menjamin hak warga negara atas pembaruan.
3. Kurang tegasnya penegakan hukum. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila, seperti penipuan dan kecurangan dalam Affiliate TikTok Shop.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya-upaya dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi bagi masyarakat, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjamin hak warga negara atas pembaruan. Pelaku usaha perlu menerapkan praktik-praktik yang sesuai dengan Sistem Ekonomi Pancasila, seperti kejujuran dan transparansi.

Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan Sistem Ekonomi Pancasila di Negara Hukum Indonesia dapat menjamin hak warga negara atas pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop.

Peran Pemerintah dalam menjamin hak warga negara atas pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop

Pemerintah tentunya memiliki peran dalam menjamin hak warga negara terkait dengan pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop atau platform perdagangan online lainnya, selain pemerintah harus mengadakan edukasi terhadap masyarakat terkait hak setiap warga negara, dan sistem ekonomi yang lebih unggul diterapkan di negara hukum indoneisa, adapun beberapa peran pemerintah yang dapat diidentifikasi:

1. Pengaturan dan Kebijakan:

Pemerintah dapat membuat peraturan dan kebijakan yang jelas terkait dengan penggunaan platform perdagangan online seperti TikTok Shop. Hal ini dapat mencakup ketentuan mengenai hak dan kewajiban pengguna, perlindungan konsumen, dan keamanan transaksi online.

2. Perlindungan Konsumen:

Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada konsumen terkait dengan transaksi online. Ini mencakup hak konsumen seperti informasi yang jelas tentang produk atau layanan, kebijakan pengembalian barang, dan perlindungan terhadap praktik bisnis yang merugikan konsumen.

3. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Pemerintah perlu memiliki lembaga atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini mencakup pemantauan praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, atau pelanggaran hak konsumen.

4. Kolaborasi dengan Platform:

Pemerintah dapat bekerja sama dengan platform seperti TikTok Shop untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kolaborasi ini dapat mencakup pemeriksaan rutin, pertemuan dialog, dan upaya bersama untuk meningkatkan standar dan keamanan.

5. Pendidikan dan Kesadaran Konsumen:

Pemerintah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak dan kewajiban mereka saat bertransaksi online. Program edukasi dan kampanye kesadaran konsumen dapat membantu mengurangi potensi penipuan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap platform tersebut.

6. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Mitra Affiliate:

Jika diperlukan, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan untuk mitra afiliasi atau pedagang yang berpartisipasi dalam platform tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan dan regulasi yang berlaku serta mengurangi risiko pelanggaran.

7. Penanganan Pengaduan dan Sengketa:

Pemerintah perlu menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani pengaduan dan sengketa antara konsumen dan penjual melalui platform tersebut. Hal ini dapat mencakup penyelesaian sengketa online dan mediasi.

8. Pembaruan Kebijakan sesuai dengan Perkembangan Teknologi:

Pemerintah perlu secara teratur meninjau dan memperbarui kebijakan dan peraturan mereka sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik perdagangan online yang baru.

Dengan menjalankan peran-peran ini, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan perdagangan online yang aman, transparan, dan adil bagi warganya yang menggunakan Affiliate TikTok Shop atau platform sejenisnya.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai Sistem Ekonomi Pancasila di Negara Hukum Indonesia dalam konteks pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop menunjukkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, salah satunya ialah keseimbangan antara ekonomi dan nilai-nilai Pancasila, Sistem Ekonomi Pancasila di Indonesia menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi dan

nilai-nilai moral, sosial, dan keadilan. Dalam konteks Affiliate TikTok Shop, pembahasan ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui platform tersebut selaras dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan Pancasila, selanjutnya Perlindungan Hak Konsumen

kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini juga adalah pentingnya pemerintah dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang mampu melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online, termasuk melalui Affiliate TikTok Shop. Perlindungan konsumen mencakup informasi yang jelas, kebijakan pengembalian barang, dan penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang merugikan. Dan tentunya Peran Pemerintah dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum karena Sistem Ekonomi Pancasila mengharapkan pemerintah untuk memiliki peran aktif dalam mengawasi dan menegakkan aturan. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan bisnis online, di mana pemerintah perlu memiliki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan pelanggaran hak konsumen. Selain itu edukasi dan kesadaran konsumen juga sangat penting karna hal ini bertujuan agar warga negara memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka ketika berinteraksi dengan Affiliate TikTok Shop atau platform perdagangan online lainnya. Dan terakhir memperketat sistem hukum untuk menangani sengketa antara konsumen dan pedagang melalui Affiliate TikTok Shop secara adil dan efisien. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kesimpulan utama adalah bahwa dalam menjalankan sistem ekonomi berdasarkan Pancasila di Negara Hukum Indonesia, pemerintah perlu melibatkan diri secara aktif dalam regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum untuk menjaga hak warga negara dalam konteks pembaruan melalui Affiliate TikTok Shop.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang Dasar 1945 Tentang Hak Asasi Manusia

Misbahul Ali, Ekonomi Pancasila Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam, Jurnal Iltizam, Vol 1 No 1 (2023)

Masdar Farid Mas'udi, Pajak itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat, Jurnal Muqtasid, Vol 2 No 1 (2011)

Blog Spot “Bhineka Tunggal Ika; Mengenal Gotong Royong, Keberagaman, Sejarah, dan Makna”, <https://cpbhinnekatunggalika.blogspot.com/>, Diakses 08 Januari 2024.